



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
**KABUPATEN  
MAROS**

**2020**



---

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN  
MAROS  
2020

<https://maroskab.go.id>



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

## KABUPATEN MAROS

2020

ISSN : -

No. Publikasi :

Katalog BPS : 4102004.7308

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 68 halaman

Naskah :

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:

Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Sumber Gambar Kulit:

Freepik.com; Canva.com

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros

*Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.*

**TIM PENYUSUN**

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN MAROS 2020**

**Pengarah:**

Marwanto, S.Si., M.Si

**Penanggung Jawab Umum:**

Marwanto, S.Si., M.Si

**Penanggung Jawab Teknis:**

Hikmayani, SST

**Editor:**

Fakiha R, SE, M.M

**Penulis dan Pengolah Data:**

Anindya Deshinta Dila, S.Tr. Stat

**Desain/Layout:**

Anindya Deshinta Dila, S.Tr.Stat

## KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga publikasi yang berjudul “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros 2020” dapat diselesaikan dengan baik.

Hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Peran para pelaku pembangunan kemudian adalah bagaimana menerjemahkan hakikat tersebut dan menjabarkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tentu saja, instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia itu telah berjalan juga menjadi faktor penting didalamnya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros berupaya untuk menyusun Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat sebagai sumber informasi penting yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan terkait pembangunan manusia di Kabupaten Maros secara berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya publikasi ini diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyusunan publikasi ini. Akhirnya kami berharap, kritik dan saran guna perbaikan publikasi dimasa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna data.

Maros, September 2021

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK**

**KABUPATEN MAROS**

**Marwanto, S.Si., M.Si**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ISTILAH TEKNIS .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I KEPENDUDUKAN .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II KESEHATAN DAN GIZI.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III PENDIDIKAN .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB IV KETENAGAKERJAAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI.....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB VII KEMISKINAN.....</b>	<b>55</b>
<b>BAB VIII SOSIAL LAINNYA.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk (jiwa), Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (persen), dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2016-2020.....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk (jiwa), Luas Daerah (km <sup>2</sup> ), dan Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020 .....	7
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen).....	8
Tabel 1.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen) .....	10
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	15
Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	15
Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	16
Tabel 2.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	17
Tabel 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	18
Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020.....	27
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020.....	28
Tabel 3.3 Jumlah Murid (jiwa), Jumlah Guru (jiwa), dan Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2019/2020 dan 2020/2021 .....	29
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Maros Agustus 2019 - Agustus 2020 (jiwa) .....	34
Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Agustus 2018 - Agustus 2020 (persen) .....	35
Tabel 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Maros Agustus 2018-Agustus 2020 (jiwa) .....	37
Tabel 4.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kabupaten Maros Agustus 2018-Agustus 2020 (jiwa) .....	37
Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Sub Kelompok Non Makanan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (rupiah) .....	42

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Sub Kelompok Makanan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (rupiah) .....	43
Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen) .....	48
Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	50
Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen) .....	52
Tabel 8.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi selama Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen) .....	63
Tabel 8.2 Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Selama Satu Tahun Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen) .....	64

<https://maroskab.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen).....	4
Gambar 1.2 Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen).....	5
Gambar 1.3 Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020 .....	6
Gambar 1.4 Persentase jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen).....	7
Gambar 1.5 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen) .....	9
Gambar 2.1. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maros tahun 2016-2020 (tahun) .....	14
Gambar 2.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	18
Gambar 3.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Maros tahun 2016-2020 (tahun) .....	24
Gambar 3.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maros tahun 2016-2020 (tahun) .....	25
Gambar 3.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen).....	26
Gambar 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Maros Agustus 2019 – Agustus 2020 (jiwa) .....	36
Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen) .....	42
Gambar 5.2 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen) .....	44
Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m <sup>2</sup> ) di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen) .....	49
Gambar 7.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Maros Tahun 2016–2020 (ribu jiwa).....	56
Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Maros Tahun 2016–2020 (rupiah/kapita/bulan). .....	57
Gambar 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Maros Tahun 2016–2020.....	58

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah/PSTN dan Komputer/Laptop di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	62
Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen) .....	65
Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) selama Selama Setahun Terakhir menurut Jenis PIP di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen) 66	
Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Atau Menerima Jaminan Sosial selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Jaminan Sosial di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen).....	67

<https://maroskab.bps.go.id>

## ISTILAH TEKNIS

### **Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk**

*Angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dengan menggunakan rumus eksponensial.*

### **Kepadatan Penduduk**

*Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.*

### **Rasio Dan Jenis Kelamin**

*Rasio antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan dikalikan 100.*

### **Metode Kontrasepsi**

*Cara/alat pencegah kehamilan.*

### **Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)**

*Orang yang mengikuti/memakai salah satu metode kontrasepsi.*

### **Angka Kematian Bayi (AKB)**

*Besarnya probabilita bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan per seribu kelahiran).*

### **Angka Harapan Hidup (AHH) Pada Waktu Lahir**

*Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.*

## **Bekerja**

*Melakukan kegiatan/pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.*

## **Angkatan Kerja**

*Penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja atau mencari pekerjaan.*

## **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

*Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun keatas.*

## **Penganggur**

*Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.*

## **Dependency Ratio/Angka Beban Tanggungan (ABT)**

*Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan 64 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 tahun sampai 64 tahun) dikalikan 100.*

## **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

*Ukuran tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut batas usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan.*

## **Luas Lantai**

*Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.*

<https://maroskab.bps.go.id>

*-sengaja dikosongkan-*

<https://maroskab.bps.go.id>

1

KEPENDUDUKAN

# Jumlah Penduduk Tahun 2020

## Menurut Jenis Kelamin

174.329 JIWA  
(48,99 %)



181.866 JIWA  
(51,01 %)



## Menurut Kelompok Umur



28,25 %

0-14



66,11 %

15-64



5,64 %

65+



## Pertumbuhan Penduduk 0,87 persen



## Rasio Jenis Kelamin 95,86

## BAB I KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Artinya, penduduk merupakan pelaku dan penggerak pembangunan. Disisi lain, hasil dari pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Karena hakikat dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan.

Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan dan tempat rekreasi. Sementara para pelaku bisnis memerlukan data penduduk untuk keperluan rencana produksi, pemasaran, dan rekrutmen pekerja/ karyawan. Dilain pihak, bagi lembaga swasta nonprofit data ini sangat dibutuhkan untuk bahan analisis suatu masalah tertentu.

Aspek kependudukan yang disajikan dalam bab ini meliputi jumlah, laju pertumbuhan penduduk dan rasio jenis kelamin, sebaran dan kepadatan penduduk, angka beban ketergantungan, wanita menurut usia perkawinan pertama, dan penggunaan alat/cara KB.

### **1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk Kabupaten Maros mengalami peningkatan di setiap tahun dalam kurun waktu 2016-2020. Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 342.890 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 356.195 jiwa pada tahun 2020. Artinya, selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Maros mengalami pertambahan sekitar 13.305 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros mengalami penurunan pada tahun 2016-2020. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 0,87 persen. Namun, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros sebesar 0,98 persen pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk (jiwa), Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (persen), dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	342.890	1,06	95,75
2017	346.383	1,02	95,75
2018	349.822	0,99	95,75
2019	353.121	0,94	95,82
2020	356.195	0,87	95,86

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahunan 2010-2020 Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahunan 2010-2020 Provinsi Sulawesi Selatan

Jika dirinci menurut kecamatan, Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Moncongloe memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,38 persen pada tahun 2020. Kemudian, diikuti Kecamatan Mandai sebesar 1,37, Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Lau sebesar 0,94. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk terendah dimiliki oleh Kecamatan Camba sebesar 0,58 persen pada tahun 2020.

# KEPENDUDUKAN

Gambar 1.2 Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)

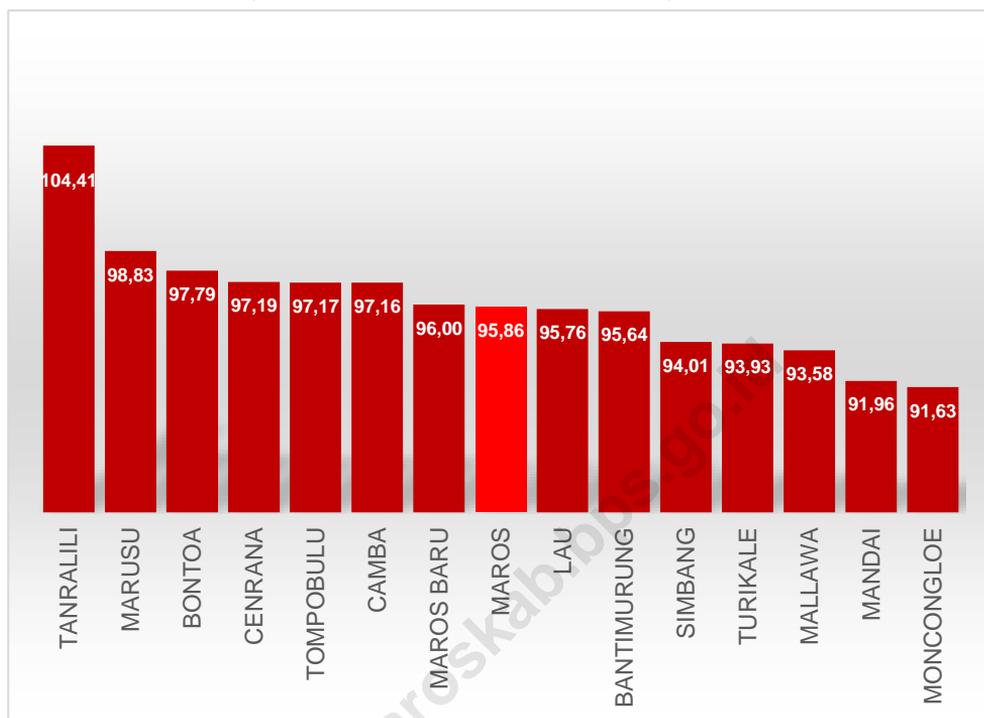


Sumber : BPS Kabupaten Maros

Selanjutnya, jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin di Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 95,86. Artinya, dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 95 atau 96 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Maros kurang dari jumlah penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin berdasarkan kecamatan, Kecamatan Tanralili memiliki rasio jenis kelamin tertinggi sebesar 104,41 pada tahun 2020. Rasio jenis kelamin di atas 100 menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Tanralili lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan. Kemudian, rasio jenis kelamin tertinggi kedua dimiliki oleh Kecamatan Marusu sebesar 98,83, dan diikuti Kecamatan Bontoa sebesar 97,79 pada tahun 2020. Sementara itu, rasio jenis kelamin terendah dimiliki oleh Kecamatan Moncongloe sebesar 91,63 pada tahun 2020.

Gambar 1.3 Rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahunan 2010-2020 Provinsi Sulawesi Selatan

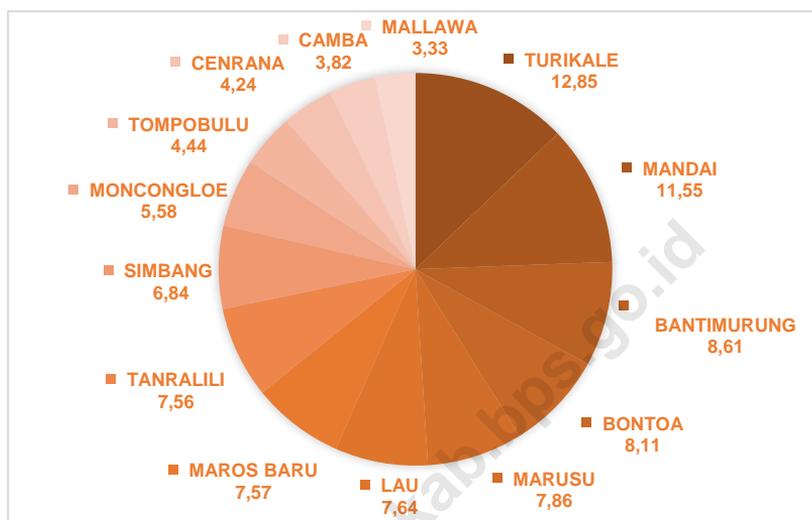
## 1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Maros diperkirakan berjumlah 356.195 jiwa yang tersebar pada 14 kecamatan. Daerah yang menonjol jumlah penduduknya adalah Kecamatan Turikale dengan jumlah penduduk sebesar 12,85 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Maros. Hal ini dikarenakan Kecamatan Turikale adalah ibu kota Kabupaten Maros sehingga menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan. Berbeda dengan Kecamatan Turikale, daerah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Mallawa sebesar 3,33 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Maros.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Maros juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 kepadatan penduduknya sebesar 212 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan pada tahun 2020 kepadatan penduduknya mencapai 219,99 jiwa per km<sup>2</sup>. Hal ini berarti dalam satu km<sup>2</sup> dihuni sekitar 219 hingga 220 penduduk.

# KEPENDUDUKAN

Gambar 1.4 Persentase jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Maros

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk (jiwa), Luas Daerah (km<sup>2</sup>), dan Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Daerah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	342.890	1.619,12	212
2017	346.383	1.619,12	213,93
2018	349.822	1.619,12	216,06
2019	353.121	1.619,12	218,09
2020	356.195	1.619,12	219,99

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

## 1.3 Angka Beban Ketergantungan

Komposisi penduduk mencerminkan angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun & 65 tahun ke atas). Penduduk Kabupaten Maros yang berusia 0-14 tahun pada tahun 2020 sebesar 28,25 persen. Kemudian, penduduk yang berusia 15-64 tahun sebesar 66,11 persen

di Kabupaten Maros tahun 2020. Sedangkan, penduduk yang berusia 65 tahun ke atas mencapai 5,64 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Maros. Angka beban ketergantungan Kabupaten Maros sebesar 51,25 persen pada tahun 2020. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 51 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)

Kelompok Umur	2020
(1)	(2)
0-14	28,25
15-64	66,11
65+	5,64
Angka Beban Ketergantungan	51,25

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Tahunan 2010-2020 Provinsi Sulawesi Selatan

#### 1.4 Wanita menurut Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, karena semakin tinggi umur perkawinan, khususnya wanita menyebabkan masa reproduksinya lebih pendek. Jika masa reproduksinya lebih pendek, maka kemungkinan jumlah anak dapat dibatasi. Hal ini berarti pula bahwa penundaan perkawinan mengakibatkan berkurangnya peluang wanita untuk melahirkan anak lebih banyak. Karena salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk adalah tingginya angka kelahiran di suatu daerah.

Berdasarkan Gambar 1.5, persentase perempuan berumur 10 tahun ke atas yang melakukan perkawinan pertamanya pada umur 16 tahun ke bawah sebesar 16,71 persen. Rendahnya persentase perempuan yang menikah pada umur 16 tahun ke bawah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama meningkat. Sebagian besar perempuan melakukan perkawinan pertama pada usia diatas 21 tahun sebesar 45,29 persen pada tahun 2020.

# KEPENDUDUKAN

Gambar 1.5 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2020

## 1.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Selain melalui penundaan usia perkawinan pertama, partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran.

Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan Tabel 1.4, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2019, penggunaan suntikan masih merupakan alat/cara KB yang paling diminati sebesar 55,12 persen pada tahun 2020. Sementara itu, MOP/vasektomi, penggunaan pil,

dan pantang berkala juga mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Alat/cara KB yang tidak ada penggunaannya adalah intravag/kondom perempuan pada tahun 2019-2020.

Tabel 1.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

<b>Alat KB/Cara Tradisional</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>MOW</b>	2,09	2,64
<b>MOP/Vasektomi</b>	0,77	0,39
<b>AKDR/IUD/Spiral</b>	3,55	7,85
<b>Suntikan</b>	56,37	55,12
<b>Susuk KB</b>	8,92	10,61
<b>Pil</b>	26,34	22,08
<b>Kondom</b>	0	0,01
<b>Intravag/Kondom Perempuan</b>	0	0
<b>Metode Menyusui Alami</b>	0	0,41
<b>Pantang Berkala</b>	1,97	0,43
<b>Lainnya</b>	0	0,48

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

<https://maroskab.bps.go.id>



KESEHATAN DAN GIZI

# Jumlah **FASILITAS KESEHATAN**

## di Kabupaten Maros Tahun 2020

Sumber : Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2021



Rumah Sakit

2



Puskesmas

14



Klinik

22



Posyandu

406



Polindes

85

## Penduduk yang mempunyai **KELUHAN KESEHATAN** selama sebulan terakhir menurut jenis kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2020

**37,21** persen



**40,84** persen

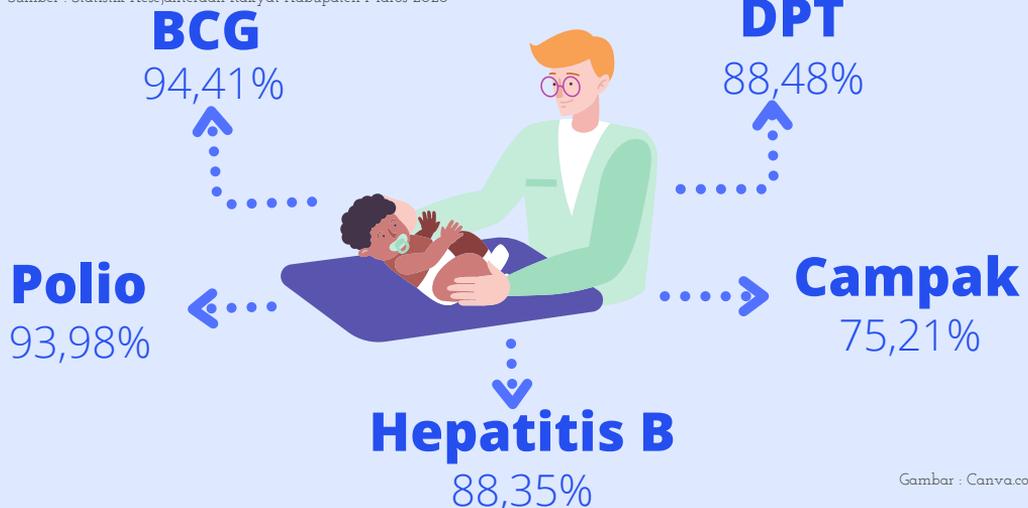


Penduduk umur 0-59 bulan (balita) yang pernah

## **MENDAPAT IMUNISASI**

di Kabupaten Maros Tahun 2020

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros 2020



## BAB II KESEHATAN DAN GIZI

Kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Keberadaan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya untuk hidup sehat. Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata.

Pemerintah juga harus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau. Caranya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dalam bab ini disajikan beberapa indikator kesehatan, diantaranya adalah derajat dan status kesehatan penduduk, sarana dan prasarana kesehatan, kesehatan ibu dan bayi, dan pemanfaatan fasilitas tenaga kesehatan.

### 2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, selain angka kesakitan masyarakat yang merepresentasikan sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan semakin meningkat, yang ditandai dengan peningkatan Umur Harapan Hidup, tercatat dari berumur 68,58 tahun

pada tahun 2016 menjadi 69,02 tahun di tahun 2020. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Gambar 2.1. Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maros tahun 2016-2020 (tahun)



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros 2021

## 2.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas, tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Persentase penduduk yang berobat jalan di Kabupaten Maros mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 44,06 persen menjadi sebesar 41,46 persen di tahun 2020. Sementara itu, persentase penduduk yang tidak berobat jalan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 55,94 persen menjadi 58,54 persen di tahun 2020. Alasan utama tidak berobat jalan didominasi oleh mengobati sendiri dan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 68,73 persen menjadi sebesar 67,35 persen di tahun 2020. Persentase penduduk dengan alasan utama tidak berobat jalan karena merasa tidak perlu merupakan terbesar kedua sebesar 24,61 persen pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 29,24 persen pada tahun 2020.

# KESEHATAN DAN GIZI

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Tidak Berobat Jalan menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

Alasan Utama Tidak Berobat Jalan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Tidak Punya Biaya Berobat	1,53	0,81
Tidak Ada Biaya Transport	0,29	0,08
Tidak Ada Sarana transportasi	0,11	0,00
Waktu Tunggu Pelayanan Lama	0,20	1,62
Mengobati Sendiri	68,73	67,35
Tidak Ada yang Mendampingi	0,30	0,73
Merasa Tidak Perlu	24,61	29,24
Lainnya	4,23	0,17
<b>Persentase penduduk yang tidak berobat jalan</b>	<b>55,94</b>	<b>58,54</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya serta jenis pelayanan kesehatan. Puskesmas/pustu lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan tempat berobat lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ketersediaan, kemudahan akses serta biaya menjadi pendorong tingginya minat masyarakat untuk berobat di puskesmas/pustu.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

Tempat Berobat	2019	2020
(1)	(2)	(3)
RS Pemerintah	9,57	6,18
RS Swasta	1,07	1,88
Praktik Dokter/Bidan	38,08	25,13
Klinik/Praktik Dokter Bersama	9,13	16,51
Puskesmas/Pustu	44,66	53,71
UKBM	7,31	1,69
Tradisional/Alternatif	0,55	0,56
Tempat Lainnya	1,78	0,51
<b>Persentase penduduk yang berobat jalan</b>	<b>44,06</b>	<b>41,46</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Keberadaan Puskesmas sangat strategis dalam pelayanan kesehatan di pedesaan. Dominasi akses puskesmas oleh masyarakat terlihat dari persentase penduduk yang berobat jalan di puskesmas. Persentase penduduk yang berobat

jalan di puskesmas meningkat dari tahun 2019 sebesar 44,66 persen menjadi sebesar 53,71 persen di tahun 2020. Sementara itu, persentase penduduk yang berobat ke tempat tradisional/alternatif merupakan terkecil pada tahun 2019 sebesar 0,55 dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,56 pada tahun 2020.

Ketiadaan biaya pengobatan menjadi salah satu penyebab menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada Januari 2014 diberlakukan bagi seluruh penduduk Indonesia tak terkecuali penduduk Kabupaten Maros, tujuannya mengatasi kendala biaya pengobatan. Berdasarkan Tabel 2.3 menunjukkan penduduk Kabupaten Maros yang tidak menggunakan jaminan kesehatan mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 43,72 persen menjadi 20,46 persen di tahun 2020. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah terbesar pada tahun 2019 sebesar 35,68 persen dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,98 persen di tahun 2020.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

Jenis Jaminan Kesehatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
<b>BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)</b>	35,68	45,98
<b>Non PBI</b>	19,11	31,52
<b>Jamkesda</b>	0,75	0,37
<b>Asuransi Swasta</b>	0	0,06
<b>Perusahaan Kantor</b>	0,75	2,03
<b>Tidak Menggunakan</b>	43,72	20,46

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

### 2.3 Kesehatan Ibu dan Bayi

Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Walaupun ada sebagian pihak yang masih belum sadar akan pentingnya imunisasi, tetapi imunisasi telah terbukti dapat meningkatkan kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu. Imunisasi merupakan program pencegahan suatu jenis penyakit tertentu.

Jenis imunisasi ada dua macam, yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan

# KESEHATAN DAN GIZI

didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Berdasarkan Tabel 2.4, persentase balita yang pernah mendapat imunisasi BCG adalah terbesar pada tahun 2019 sebesar 91,69 persen dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 94,41 persen pada tahun 2020. Sedangkan, jenis imunisasi DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B masing-masing sebesar 88,48 persen, 93,98 persen, 75,21 persen, dan 88,35 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Umur 0-59 Bulan (Balita) yang Pernah Mendapat Imunisasi menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

Jenis Imunisasi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
<b>BCG</b>	91,69	94,41
<b>DPT</b>	86,30	88,48
<b>Polio</b>	90,61	93,98
<b>Campak</b>	63,68	75,21
<b>Hepatitis B</b>	84,32	88,35

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Maros

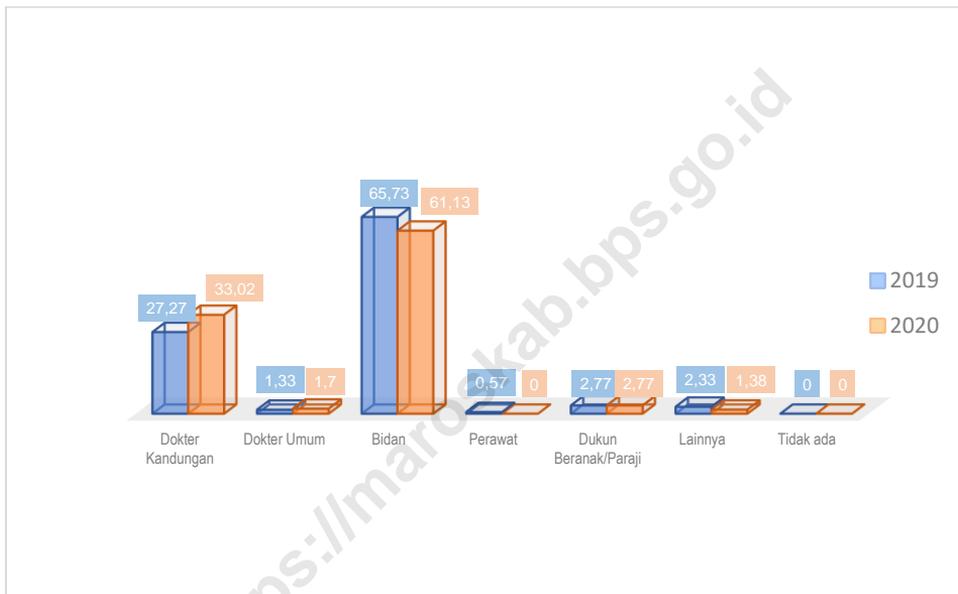
## 2.4 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Penolong persalinan sangat berpengaruh terhadap keselamatan serta kesehatan bayi dan ibu pada saat proses persalinan. Penolong persalinan yang berkualitas tentunya lebih memungkinkan terwujudnya keselamatan dan kesehatan bayi serta ibu pada saat persalinan. Tenaga medis sebagai penolong persalinan tentunya lebih baik dibanding tenaga non medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan.

Berdasarkan Gambar 2.2, persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dengan penolong proses kelahiran terakhir oleh bidan adalah terbesar pada tahun 2019 sebesar 65,73 persen. Namun, angka tersebut menurun menjadi sebesar 61,13 persen pada tahun 2020. Sementara itu,

persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin dengan penolong proses kelahiran terakhir oleh dokter kandungan adalah terbesar kedua pada tahun 2019 sebesar 27,27 persen dan mengalami peningkatan menjadi 33,02 persen di tahun 2020.

Gambar 2.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

Fasilitas Kesehatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
<b>RS Pemerintah/Swasta/RSIA</b>	35,06	39,66
<b>Rumah Bersalin/Klinik</b>	16,54	11,5
<b>Puskesmas</b>	13,5	32,46
<b>Pustu</b>	2,75	0,97
<b>Praktek Tenaga Kesehatan</b>	13,55	8,75
<b>Polindes/Poskesdes</b>	2,46	0
<b>Rumah</b>	16,14	6,67
<b>Lainnya</b>	0	0

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

# KESEHATAN DAN GIZI

Ketersediaan akses dan sarana pelayanan dalam bentuk fasilitas persalinan merupakan pelengkap penyelenggaraan kesehatan. Adanya fasilitas kesehatan akan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perluasan akses fasilitas kesehatan diikuti dengan peningkatan penggunaan fasilitas kesehatan untuk menunjang persalinan di Kabupaten Maros. Berdasarkan Tabel 2.5, persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak terakhir di rumah sakit pemerintah/swasta/RSIA adalah terbesar pada tahun 2019 sebesar 35,06 persen dan meningkat menjadi 39,66 persen di tahun 2020.

<https://maroskab.bps.go.id>

<https://microskab.bps.go.id>

*-sengaja dikosongkan-*

<https://maroskab.bps.go.id>

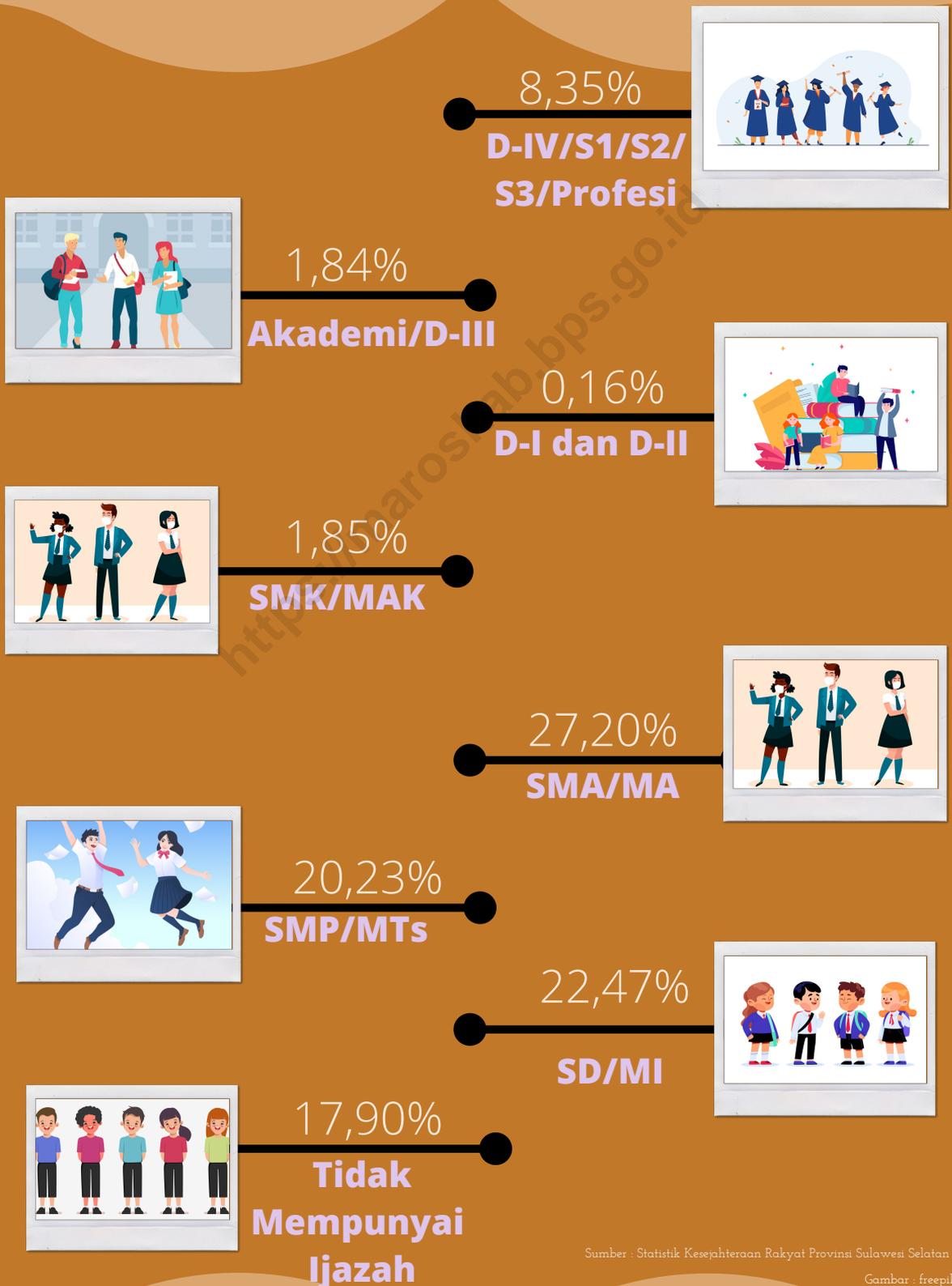
3

PENDIDIKAN

Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut

## IJAZAH/STTB TERTINGGI YANG DIMILIKI

di Kabupaten Maros Tahun 2020



## BAB III PENDIDIKAN

Tujuan besar bangsa Indonesia tertera dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu segala kebijakan pendidikan haruslah mengarah pada satu tujuan tersebut. Hal ini bersesuaian dengan pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pendidikan bukanlah barang instan dalam mencapainya, melainkan proyek jangka panjang yang bahkan akan terus berlangsung selama negara ini berdiri. Oleh karena itu, konsistensi dalam melakukan perbaikan sangat diperlukan mulai dari kualitas pendidik, sistem pendidikan, kurikulum yang digunakan, siswa, birokrasi pendidikan, penggunaan anggaran, hingga segala hal yang terkait dengan proses mendidik. Hal ini dikarenakan tidak ada negara maju yang tidak memperhatikan pendidikannya.

### 3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) / *Expected Years of Schooling* (EYS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar sejak usia 7 tahun.

HLS Kabupaten Maros tahun 2020 sebesar 13,04 tahun. Artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,04 tahun atau setara dengan Diploma I/II. Berdasarkan Gambar 3.1 menunjukkan adanya peningkatan HLS di Kabupaten Maros pada tahun 2016-2020. HLS Kabupaten Maros di tahun 2016

mencapai 12,96 tahun setara dengan lulus SMA, sedangkan di tahun 2020 HLS Kabupaten Maros mencapai 13,04 tahun setara dengan Diploma I/II.

Gambar 3.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Maros tahun 2016-2020 (tahun)



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros 2021

### 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years of Schooling (MYS)*

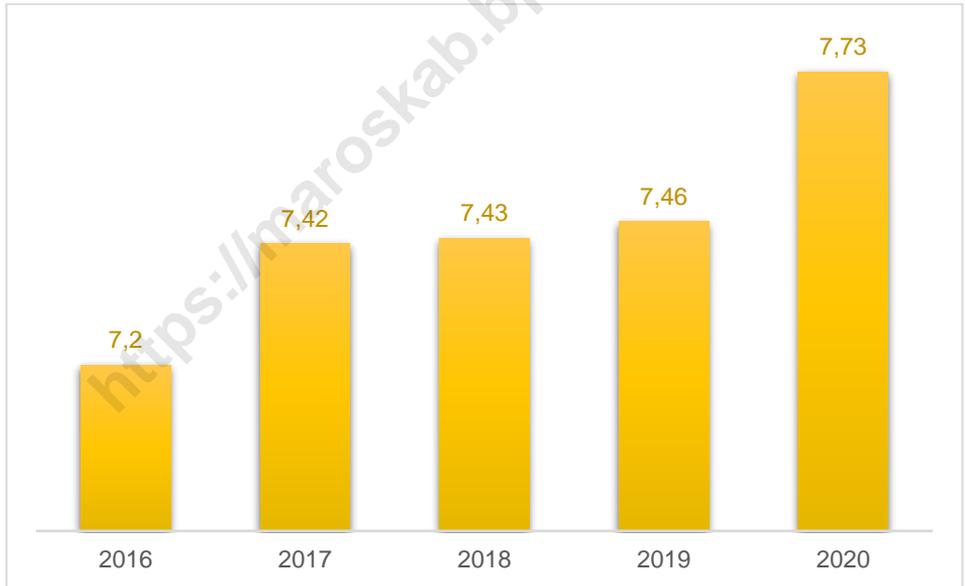
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk dalam menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini berguna untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi pencapaian dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP lama sekolah 9 tahun, tamat SMA lama sekolah 12 tahun, tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS pada penghitungan IPM metode lama dan metode baru. Penghitungan IPM dengan metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun keatas. Sedangkan penghitungan IPM dengan metode baru, RLS dihitung

untuk penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Berdasarkan Gambar 3.2, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maros mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020. RLS Kabupaten Maros mencapai 7,2 tahun pada tahun 2016. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Maros yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,2 tahun. Kemudian, RLS Kabupaten Maros mencapai 7,73 tahun pada tahun 2020. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Maros yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,73 tahun.

Gambar 3.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maros tahun 2016-2020 (tahun)



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maros 2021

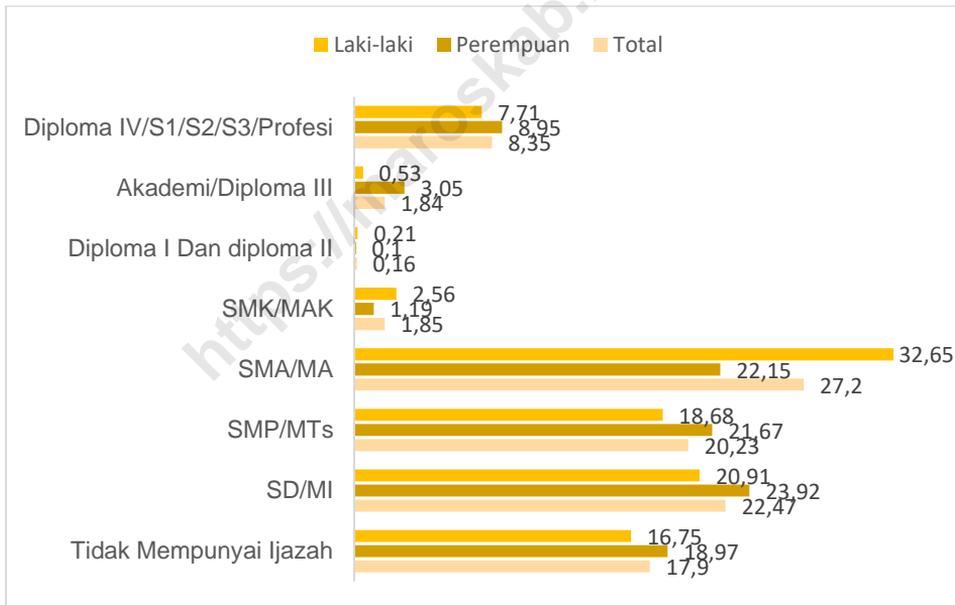
### 3.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pendidikan itu berfungsi mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Pada umumnya pendidikan yang tinggi akan memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Ijazah

pendidikan yang tinggi sebenarnya tidak menentukan kesuksesan seseorang dikemudian hari, namun kegigihan dan ketabahannya pada apa yang diperoleh selama masa pendidikan itulah yang memberi bekal dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Maka disinilah letak peran penting pendidikan yang sesungguhnya.

Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada mata rantai tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi, keterampilan/keahlian semakin meningkat dan akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Hal ini disinyalir dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya penghasilan tentu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan gambar 3.3, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas paling banyak memiliki ijazah/STTB jenjang pendidikan SMA/MA sebesar 27,2 persen pada tahun 2020. Kemudian, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang paling sedikit memiliki ijazah/STTB jenjang pendidikan Diploma I/II sebesar 0,16 persen pada tahun 2020. Penduduk Kabupaten Maros berumur 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah sebesar 17,9 persen.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah/STTB jenjang pendidikan SMA/MA sebesar 32,65 persen pada tahun 2020. Sedangkan, persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah/STTB jenjang pendidikan SMA/MA sebesar 22,15 persen pada tahun 2020. Kemudian, persentase penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sebesar 16,75 persen pada tahun 2020. Sedangkan, persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah sebesar 18,97 persen pada tahun 2020.

### 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menunjukkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang sedang ditempuh. Sejak tahun 2009, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan perannya dalam menentukan APS. Meningkatnya APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
5-6	28,38	13,83	20,87
7-12	99,25	100	99,6
13-15	91,79	100	95,77
16-18	75,08	66,74	70,73

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Tabel 3.1, APS kelompok umur 5-6 tahun sebesar 20,87 persen dan meningkat di kelompok umur 7-12 tahun menjadi 99,6 persen. Kemudian, APS menurun pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun masing-masing sebesar 95,77 persen dan 70,73 persen. Pada kelompok umur 5-6 tahun dan 16-18 tahun, APS laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sedangkan, APS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. APS Kabupaten Maros sebesar 70,73 persen pada kelompok umur 16-18 tahun dapat diartikan bahwa ada sekitar 70 atau 71 orang dari penduduk berusia 16-18 tahun yang telah bersekolah pada tingkat pendidikan SMA/SMK.

### 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Tujuan dari perhitungan APM adalah untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	99,25	99,63	99,42
SMP	69,83	76,21	72,92
SMA	74,56	58,24	66,04

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Jika melihat APM di Kabupaten Maros tahun 2020, APM terendah terdapat pada jenjang SMA baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. APM perempuan untuk jenjang SMA memiliki nilai terendah sebesar 58,24 persen. APM tertinggi terdapat pada jenjang SD untuk perempuan yaitu sebesar 99,63 persen. APM jenjang pendidikan SD sebesar 99,42 persen

dapat diartikan bahwa 99,42 persen penduduk kelompok usia sekolah tingkat SD (7-12 tahun) bersekolah pada jenjang SD tepat waktu. APM jenjang pendidikan SMP dan SMA Kabupaten Maros secara berturut-turut sebesar 72,92 persen dan 66,04 persen pada tahun 2020.

### 3.6 Rasio Murid-Guru

Rasio murid dengan guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid dengan guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid dengan guru digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio murid dengan guru berarti semakin besar beban guru dalam mengawasi murid sehingga akan semakin besar murid yang kurang perhatian dari gurunya. Semakin banyak murid yang menjadi tanggungan guru akan mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Sebaliknya, semakin kecil rasio murid dengan guru memungkinkan adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Hal ini dikarenakan murid lebih banyak mendapat perhatian dari guru, begitu juga guru menjadi lebih ringan bebannya dalam melakukan pengawasan dan pengajaran kepada murid.

Tabel 3.3 Jumlah Murid (jiwa), Jumlah Guru (jiwa), dan Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Maros Tahun 2019/2020 dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan	2019/2020			2020/2021		
	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid/Guru	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid/Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD/MI	43841	2873	15,26	44533	2880	15,46
SMP/MTS	20656	1686	12,25	20275	1749	11,59
SMA/SMK/MA	18275	1246	14,67	17726	1369	12,95

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

Di Kabupaten Maros, rasio murid dengan guru untuk jenjang SD/MI mengalami peningkatan dari tahun 2019/2020 sebesar 15,26 menjadi sebesar 15,46 pada tahun 2020/2021. Hal ini dapat diartikan pada jenjang SD/MI satu orang guru memiliki tanggungan mendidik murid sebanyak 16 orang

(pembulatan ke atas) pada tahun 2020/2021. Rasio murid dengan guru untuk jenjang SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2019/2020 sebesar 12,25 menjadi sebesar 11,59 pada tahun 2020/2021. Hal ini dapat diartikan pada jenjang SMP/MTs satu orang guru memiliki tanggungan mendidik murid sebanyak 12 orang (pembulatan ke atas) pada tahun 2020/2021. Kemudian, rasio murid dengan guru untuk jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan dari tahun 2019/2020 sebesar 14,67 menjadi sebesar 12,95 pada tahun 2020/2021. Hal ini dapat diartikan pada jenjang SMA/SMK/MA satu orang guru memiliki tanggungan mendidik murid sebanyak 13 orang (pembulatan ke atas) pada tahun 2020/2021.

<https://maroskab.bps.go.id>

<https://maroskab.bps.go.id>

4

KETENAGAKERJAAN



## BAB IV KETENAGAKERJAAN

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin dengan menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Dengan demikian pemerintah perlu strategi pembangunan yang berorientasi pada perluasan/pembukaan kesempatan kerja. Kemudian sejauh mana pemerintah mengambil strategi seperti itu dan menjalankannya seefektif mungkin, telah dianggap sebagai salah satu batu ujian yang penting artinya bagi keberhasilan pembangunan. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Penduduk yang termasuk dalam usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk usia kerja sendiri terbagi lagi menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara itu,

penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah penduduk Kabupaten Maros yang termasuk dalam angkatan kerja pada Bulan Agustus 2020 sebanyak 166.446 orang. Sedangkan, penduduk yang termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 100.184 orang. Baik jumlah angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja mengalami peningkatan pada Agustus 2019-Agustus 2020

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Maros Agustus 2019 - Agustus 2020 (jiwa)

Jenis Kegiatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
<b>Angkatan Kerja</b>	159.217	166.446
<b>Bekerja</b>	151.722	155.993
<b>Pengangguran Terbuka</b>	7.495	10.453
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	93.906	100.184
<b>Sekolah</b>	18.237	16.976
<b>Mengurus Rumah Tangga</b>	66.569	69.703
<b>Lainnya</b>	9.100	13.505

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan

#### 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK Kabupaten Maros selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. TPAK tercatat sebesar 60,53 persen pada Agustus 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa sebanyak 60,53 persen dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi sedangkan sisanya tergolong bukan angkatan kerja yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya. Kemudian, TPAK mengalami peningkatan menjadi 63,62 persen pada Agustus 2019. Namun, TPAK menurun menjadi 62,43 persen pada Agustus 2020.

# KETENAGAKERJAAN

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki selalu berada di atas TPAK perempuan. TPAK laki-laki sebesar 80,25 persen pada Agustus 2018 dan meningkat menjadi 84,74 persen pada Agustus 2019. Namun, TPAK laki-laki mengalami penurunan menjadi sebesar 82,45 persen pada Agustus 2020. Sedangkan, TPAK perempuan sebesar 42,05 pada Agustus 2018 dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 43,80 persen pada Agustus 2019. Namun, TPAK perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 43,63 persen pada Agustus 2020. TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki dapat dikarenakan secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Agustus 2018 - Agustus 2020 (persen)

Jenis Kelamin	TPAK			TPT		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Laki-Laki	80,25	84,74	82,45	5,68	5,17	6,59
Perempuan	42,05	43,80	43,63	5,74	3,07	5,73
Laki-Laki + Perempuan	60,53	63,62	62,43	5,70	4,42	6,28

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan

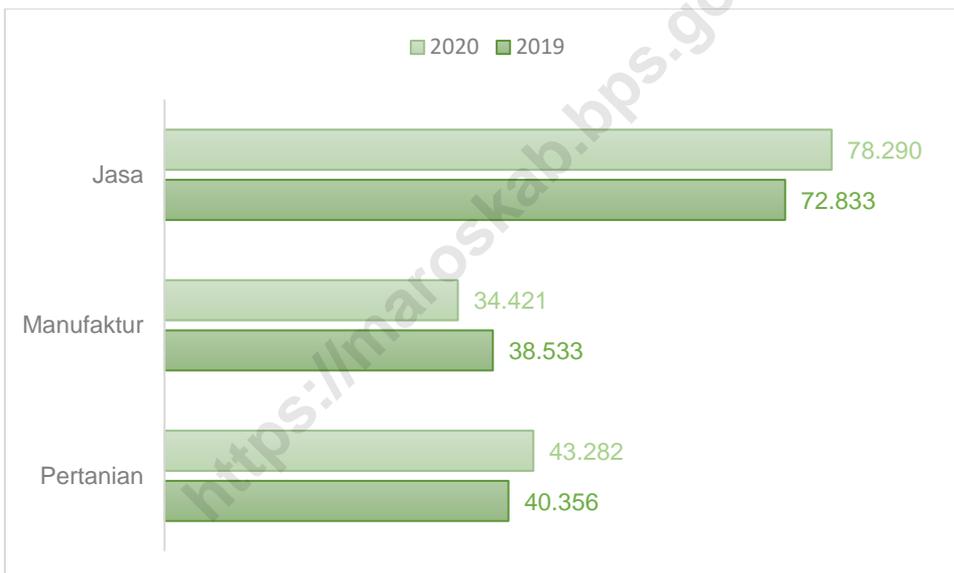
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan dengan jumlah keseluruhan angkatan kerja. TPT mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Naik turunnya TPT dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun dan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. TPT Kabupaten Maros mengalami fluktuasi pada Agustus 2018-Agustus 2020. TPT sebesar 5,70 persen pada Agustus 2018. Kemudian, TPT menurun menjadi 4,42 persen pada Agustus 2019. Selanjutnya, TPT mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,28 persen pada Agustus 2020.

## 4.2 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di lapangan pekerjaan pertanian mengalami

peningkatan dari Agustus 2019 sebesar 40.356 jiwa menjadi sebesar 43.282 jiwa pada Agustus 2020. Kemudian, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di lapangan pekerjaan manufaktur sebesar 38.533 jiwa pada Agustus 2019. Namun, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di lapangan pekerjaan manufaktur mengalami penurunan menjadi sebesar 34.421 jiwa pada Agustus 2020. Selanjutnya, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di lapangan pekerjaan jasa sebesar 72.833 jiwa pada Agustus 2019 dan meningkat menjadi sebesar 78.290 jiwa pada Agustus 2020.

Gambar 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Maros Agustus 2019 – Agustus 2020 (jiwa)



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Tabel 4.3, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai memiliki jumlah paling besar dibandingkan status pekerjaan yang lain sebesar 60.503 jiwa pada Agustus 2018. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi sebesar 64.823 jiwa pada Agustus 2019. Namun, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mengalami penurunan menjadi sebesar 63.800 jiwa pada Agustus 2020.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah terbesar kedua sebesar 28.227 jiwa pada Agustus 2018. Angka tersebut mengalami peningkatan pada Agustus 2019 dan Agustus 2020 masing-masing menjadi sebesar 29.237 jiwa dan 31.744 jiwa.

# KETENAGAKERJAAN

Kemudian, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain adalah terbesar ketiga sebesar 27.998 jiwa pada Agustus 2018. Angka tersebut mengalami penurunan pada Agustus 2019 menjadi sebesar 25.029 jiwa dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 28.431 jiwa pada Agustus 2020.

Tabel 4.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Maros Agustus 2018-Agustus 2020 (jiwa)

Status Pekerjaan Utama	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	27.998	25.029	28.431
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	28.227	29.237	31.744
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.981	5.543	3.059
Buruh/karyawan/pegawai	60.503	64.823	63.800
Pekerja bebas di pertanian	2.277	1.401	927
Pekerja bebas di non pertanian	6.800	8.070	5.895
Pekerja tak dibayar	12.030	17.619	22.137

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan

## 4.3 Jumlah Jam Kerja

Tabel 4.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Jumlah Jam Kerja Seluruhnya di Kabupaten Maros Agustus 2018-Agustus 2020 (jiwa)

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
0*)	4.899	8.465	8.263
1-14	19.093	20.064	22.854
15-34	34.074	44.212	45.701
35+	81.750	78.981	79.175

\*) Sementara Tidak Bekerja

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang memiliki jam kerja lebih dari 35 jam selama seminggu yang lalu adalah terbesar pada Agustus 2018 sebesar 81.750 jiwa. Angka tersebut menurun menjadi sebesar 78.981 jiwa pada Agustus 2019 dan meningkat menjadi sebesar 79.175 jiwa pada Agustus 2020. Kemudian, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas

yang memiliki jam kerja 15-34 jam selama seminggu yang lalu adalah terbesar kedua pada Agustus 2018 sebesar 34.074 jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan pada Agustus 2019 dan Agustus 2020 masing-masing menjadi sebesar 44.212 jiwa dan 45.701 jiwa.

<https://maroskab.bps.go.id>

<https://maroskab.bps.go.id>

5

POLA KONSUMSI

# PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

## MENURUT KELOMPOK KOMODITAS

Bukan  
Makanan

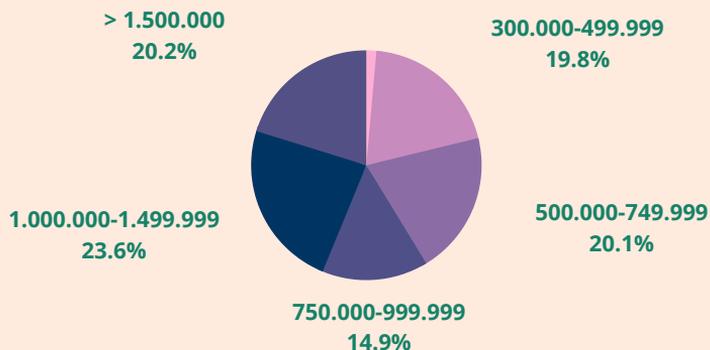
51,58%



Makanan

48,42%

## Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Maros Tahun 2020



# TARAF DAN POLA KONSUMSI

## BAB V

### TARAF DAN POLA KONSUMSI

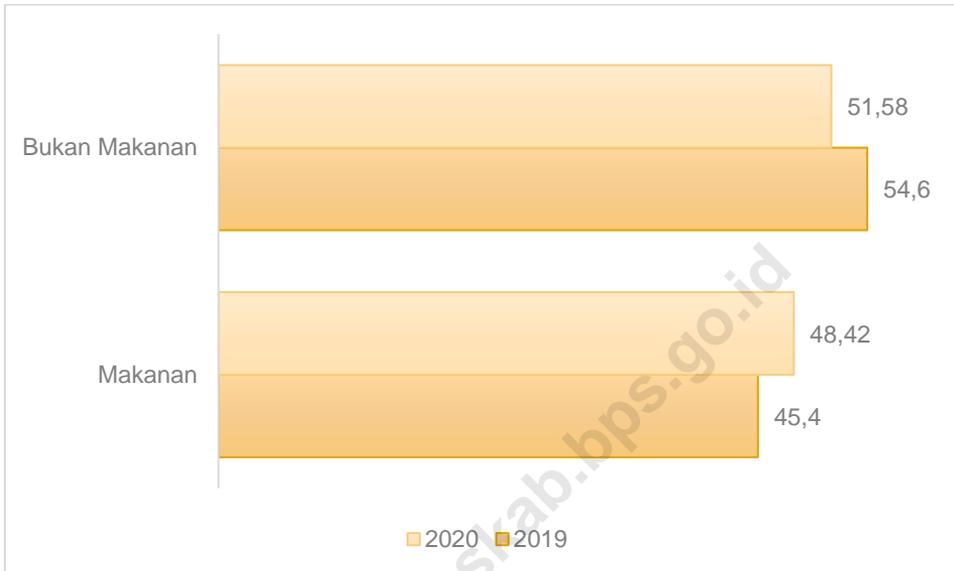
Taraf dan pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu dari sekian indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan dibanding non makanan, mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga.

#### 5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Jenis pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluarannya. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini terlihat pada kelompok penduduk dengan tingkat konsumsi makanannya yang mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau untuk ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat diketahui bahwa pengeluaran penduduk Kabupaten Maros lebih banyak digunakan untuk konsumsi bukan makanan dibandingkan konsumsi makanan. Persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sebesar 45,4 persen pada tahun 2019. Angka tersebut meningkat menjadi sebesar 48,42 persen pada tahun 2020. Sedangkan, persentase pengeluaran per kapita sebulan untuk bukan makanan sebesar 54,6 persen pada tahun 2019. Angka tersebut menurun menjadi sebesar 51,58 persen pada tahun 2020.

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)



Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Sub Kelompok Non Makanan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (rupiah)

Kelompok Non Makanan	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan (rupiah)
(1)	(2)
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	280150
Aneka komoditas dan jasa	104441
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	38128
Komoditas tahan lama	85873
Pajak, pungutan, dan asuransi	36574
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	31926
<b>Jumlah</b>	<b>577091</b>

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

# TARAF DAN POLA KONSUMSI

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Sub Kelompok Makanan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (rupiah)

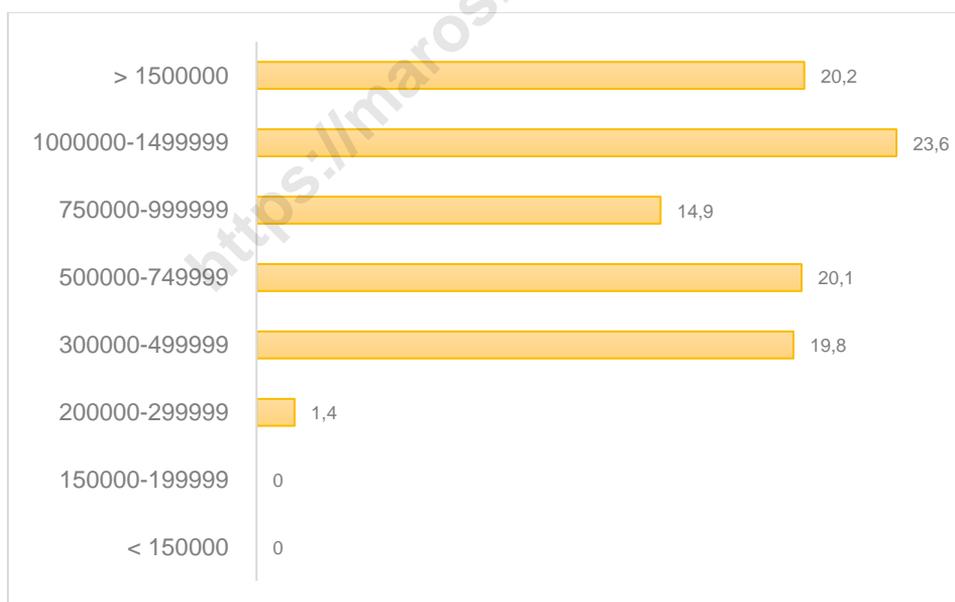
<b>Kelompok Makanan</b>	<b>Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Sebulan (rupiah)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Padi-padian</b>	71721
<b>Umbi-umbian</b>	2494
<b>Ikan/udang/cumi/kerang</b>	64764
<b>Daging</b>	16921
<b>Telur dan susu</b>	36398
<b>Sayur-sayuran</b>	28909
<b>Kacang-kacangan</b>	6909
<b>Buah-buahan</b>	26929
<b>Minyak dan kelapa</b>	12697
<b>Bahan minuman</b>	16845
<b>Bumbu-bumbuan</b>	14547
<b>Konsumsi lainnya</b>	10410
<b>Makanan dan minuman jadi</b>	165951
<b>Rokok</b>	66211
<b>Jumlah</b>	<b>541707</b>

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

Pada kelompok makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan terbesar ada pada sub kelompok makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar Rp 165.951 pada tahun 2020. Selanjutnya, diikuti oleh sub kelompok padi-padian dan rokok yang masing-masing sebesar Rp 71.721 dan Rp 66.211 pada tahun 2020. Sedangkan, rata-rata pengeluaran per kapita terbesar untuk kelompok non makanan adalah pada sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp 280.150 pada tahun 2020. Pengeluaran terbesar kedua adalah sub kelompok aneka komoditas dan jasa sebesar Rp 104.441 pada tahun 2020, diikuti sub kelompok komoditas tahan lama sebesar Rp 85.873 pada tahun 2020. Sementara itu, rata-rata pengeluaran per kapita selama sebulan yang terendah untuk kelompok non makanan di Kabupaten Maros pada tahun 2020 adalah sub kelompok keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar Rp 31.926.

Berdasarkan Gambar 5.2 terlihat bahwa persentase penduduk menurut golongan pengeluarannya terbesar berada pada golongan Rp 1.000.000 s.d. Rp 1.499.999 pada tahun 2020. Kemudian, tidak ada penduduk Kabupaten Maros yang termasuk pada golongan pengeluaran Rp 150.000 s.d. Rp 199.999 dan kurang dari Rp 150.000. Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan. Hal ini dikarenakan pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan dari suatu pembangunan. Ketimpangan dalam pembangunan antar daerah dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran penduduk sebagai indikator proxy-nya. Perhitungan distribusi pendapatan menggunakan pendekatan pengeluaran, minimal dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)



Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

<https://maroskab.bps.go.id>



PERUMAHAN  
DAN  
LINGKUNGAN

Persentase rumah tangga menurut beberapa

## FASILITAS PERUMAHAN

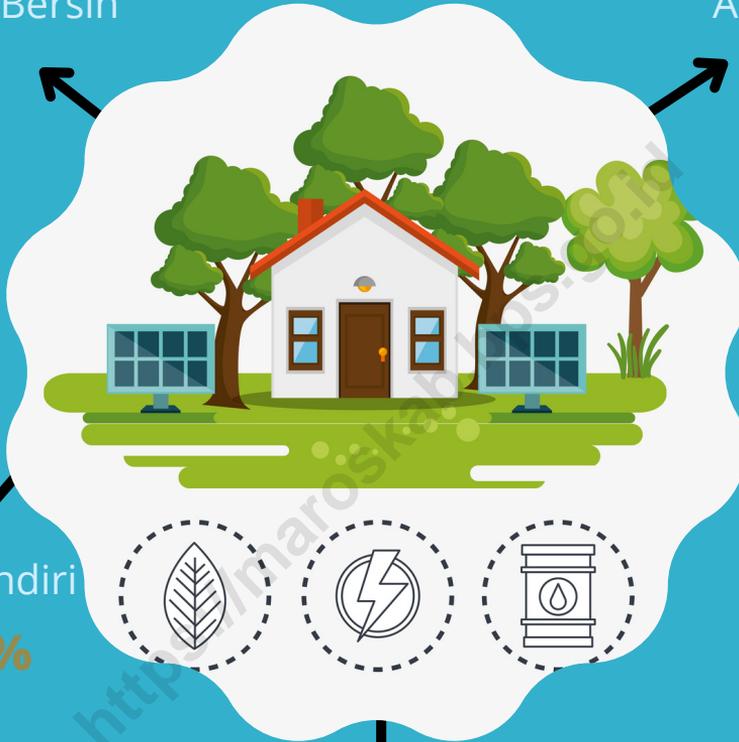
di Kabupaten Maros Tahun 2020

Air Minum Bersih

**80,02%**

Air Minum Layak

**38,58%**



Jamban Sendiri

**82,68%**

**96,33%**

Penggunaan gas elpiji untuk memasak

Sumber Penerangan Listrik

**98,86%**

## STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

Milik Sendiri

**89,72%**

Kontrak/Sewa

**1,90%**

Bebas Sewa

**7,77%**

Dinas/Lainnya

**0,61%**



# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

## BAB VI

### PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah beserta fasilitas dan lingkungannya merupakan kebutuhan dasar, juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah berfungsi pula sebagai sarana pengaman dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Fungsinya sebagai pengaman bukan berarti menutup diri melainkan tetap harus membuka diri dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal berpengaruh terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen Nomor 9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material rumah, seperti lantai terluas yang digunakan, jenis atap, dan dinding terluas yang digunakan. Selain itu, fasilitas penunjang meliputi luas lantai tempat tinggal, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

## 6.1 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok dan kayu, dengan beratapkan beton, genteng, seng, dan asbes serta memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan Tabel 6.1, persentase rumah tangga Kabupaten Maros yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,26 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 99,56 persen pada tahun 2020.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan Tabel 6.1, rumah tinggal dengan atap beton, genteng, seng, dan asbes mencapai 98,51 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 98,69 persen pada tahun 2020. Sementara itu, penggunaan dinding terluas yang terbuat dari tembok dan kayu meningkat dari 62,97 persen di tahun 2019 menjadi 69,83 persen di tahun 2020. Dari 3 indikator yang telah disebutkan mengindikasikan bahwa masyarakat telah tinggal dengan kualitas rumah tempat tinggal yang semakin baik dan memenuhi kriteria yang layak huni.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

<b>Indikator Kualitas Perumahan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Lantai bukan tanah</b>	99,26	99,56
<b>Atap beton, genteng, seng, dan asbes</b>	98,51	98,69
<b>Dinding terluas tembok dan kayu</b>	62,97	69,83

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

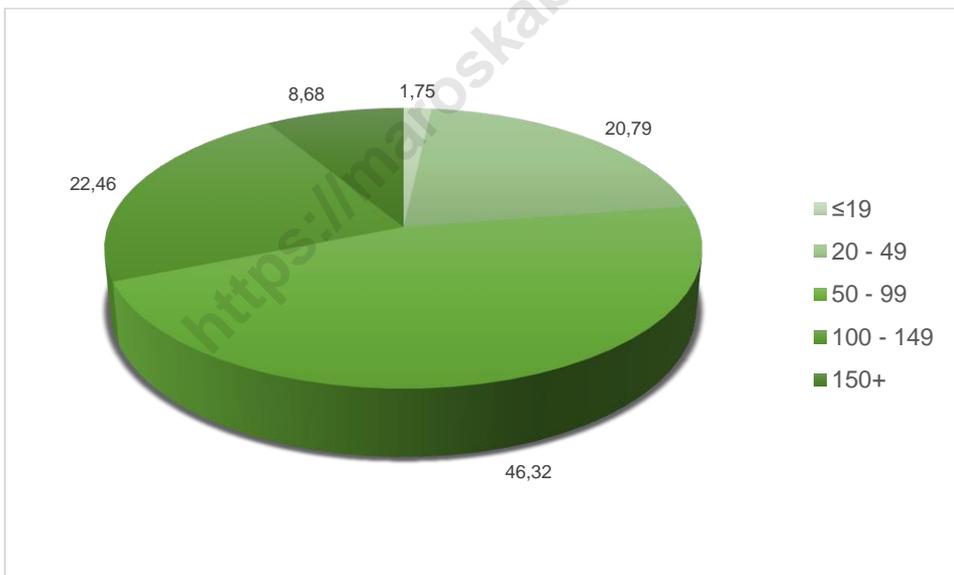
Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan menurut ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per

# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup> (BPS, 2001).

Dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga adalah 4-5 orang, maka rumah tinggal ideal adalah rumah dengan luas lantai minimal 50 m<sup>2</sup>. Berdasarkan Gambar 6.1 terlihat bahwa 77,46 persen rumah tangga yang ada di Kabupaten Maros memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup> karena memiliki luas lantai lebih dari 50 m<sup>2</sup>. Dengan kata lain, mayoritas penduduk Kabupaten Maros tinggal di rumah yang telah memenuhi kriteria sehat atau ideal.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m<sup>2</sup>) di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2020

## 6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal dan layak. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, dan penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting

bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Beberapa fasilitas perumahan yang mendukung tempat tinggal yang layak dan sehat adalah air minum yang sehat, jamban sendiri, sumber penerangan listrik, dan penggunaan gas elpiji untuk bahan bakar memasak. Pada tahun 2020, rumah tangga di Kabupaten Maros yang menggunakan air bersih sebagai sumber air minum mencapai 80,02 persen atau meningkat dibanding tahun 2019 (71,18 persen). Kemudian, rumah tangga yang menggunakan air layak sebagai sumber air minum sebesar 35,31 persen dan meningkat menjadi sebesar 38,58 persen pada tahun 2020.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

<b>Fasilitas Perumahan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Air minum bersih</b>	71,18	80,02
<b>Air minum layak</b>	35,31	38,58
<b>Jamban sendiri</b>	74,06	82,68
<b>Sumber penerangan listrik</b>	97,34	98,86
<b>Penggunaan gas elpiji untuk bahan bakar memasak</b>	94,26	96,33

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat.

Persentase rumah tangga di Kabupaten Maros yang memiliki fasilitas buang air besar berupa jamban sendiri di rumahnya sebesar 74,06 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 82,68 persen pada tahun 2020. Sedangkan, 8,42 persen rumah tangga tidak memiliki jamban sendiri dalam

# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

artian penggunaan bersama rumah tangga lain dan MCK umum pada tahun 2019. Angka tersebut meningkat menjadi 8,46 persen pada tahun 2020. Kemudian, rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar sebesar 17,07 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi sebesar 8,55 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non PLN) karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas penerangan listrik sebesar 97,34 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 98,86 persen pada tahun 2020.

Sejak berlakunya program konversi (pengalihan pemakaian) minyak tanah ke elpiji 3 kg tahun 2007, masyarakat mulai melakukan peralihan bahan bakar memasak dari minyak tanah, arang, kayu bakar atau lainnya ke pemakaian elpiji. Pemakaian elpiji yang lebih praktis, efisien, dan bersih dibandingkan bahan bakar lainnya membuat pengguna elpiji terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengguna elpiji untuk bahan bakar memasak sebesar 94,26 persen di tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 96,33 persen pada tahun 2020. Penggunaan elpiji merupakan salah satu fasilitas rumah tangga yang mencerminkan masyarakat yang lebih modern.

## 6.1 Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas/lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan Tabel 6.3, persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri adalah terbesar sebesar 88,89 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 89,72 persen pada tahun 2020. Kemudian, persentase rumah tangga yang kontrak/sewa tempat tinggal yang ditempati sebesar 4,06 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi sebesar 1,90 persen

pada tahun 2020. Persentase rumah tangga yang bebas sewa tempat tinggal yang ditempati sebesar 6,82 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 7,77 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, persentase rumah tangga yang menempati rumah dinas/lainnya sebesar 0,23 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 0,61 persen pada tahun 2020. Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki tempat tinggal sendiri mengindikasikan semakin meningkatnya kemampuan penduduk Kabupaten Maros dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kepemilikan rumah.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)

<b>Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>Milik Sendiri</b>	88,89	89,72
<b>Kontrak/Sewa</b>	4,06	1,90
<b>Bebas Sewa</b>	6,82	7,77
<b>Dinas/Lainnya</b>	0,23	0,61

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

<https://maroskab.bps.go.id>



KEMISKINAN

Jumlah

# PENDUDUK MISKIN

di Kabupaten Maros Tahun 2020

**34,62** ribu jiwa

**INDEKS KEDALAMAN  
KEMISKINAN (P1)**

**1,45**



Persentase **PENDUDUK MISKIN**

di Kabupaten Maros Tahun 2020 **9,74** persen



**INDEKS KEPARAHAN  
KEMISKINAN (P2)**

**0,34**

**GARIS KEMISKINAN**

**414.342**

Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021  
Gambar : freepik.com

## BAB VII KEMISKINAN

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah tersebut. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat bahkan menyisakan masalah kemiskinan untuk sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor produksi yang tersedia maupun hasil yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang terjadi, beberapa metode yang biasa digunakan adalah Head Count Index. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut dengan garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinanannya. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi dan sebagainya). Singkatnya, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan tersebut maka orang tersebut akan dikategorikan miskin.

### 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan;

dan persebarannya menurut wilayah. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran. Berdasarkan Gambar 7.1, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros menunjukkan tren menurun selama periode 2016-2020. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Maros sebesar 11,41 persen (39,02 ribu jiwa) pada tahun 2016 dan menurun menjadi sebesar 9,74 persen (34,62 ribu jiwa) pada tahun 2020.

Gambar 7.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Maros Tahun 2016–2020 (ribu jiwa)



Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

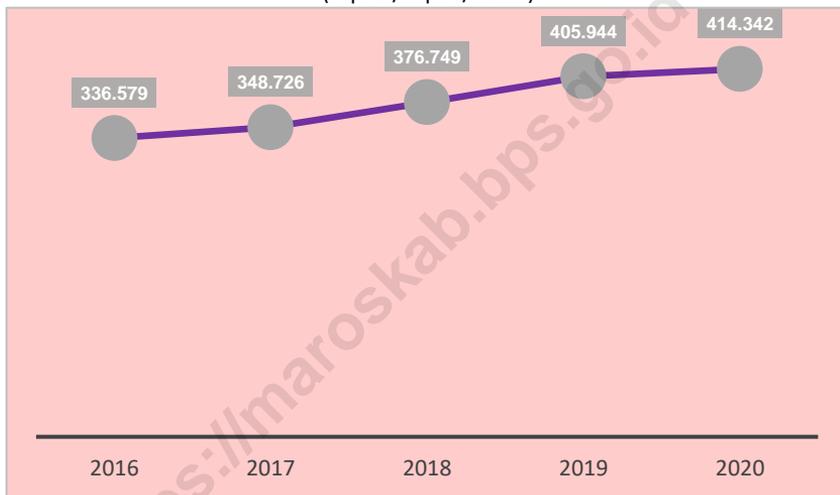
## 7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Gambar 7.2, garis kemiskinan Kabupaten Maros mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020. Garis kemiskinan sebesar Rp 336.579 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar Rp 414.342 pada tahun 2020.

Selain Garis Kemiskinan (GK), indeks yang digunakan untuk melihat indikator lain dari kemiskinan yaitu indeks kedalaman dan indeks keparahan

kemiskinan. Indeks kedalaman mengandung arti sejauh mana rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gaps Index* (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan.

Gambar 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Maros Tahun 2016–2020 (rupiah/kapita/bulan)



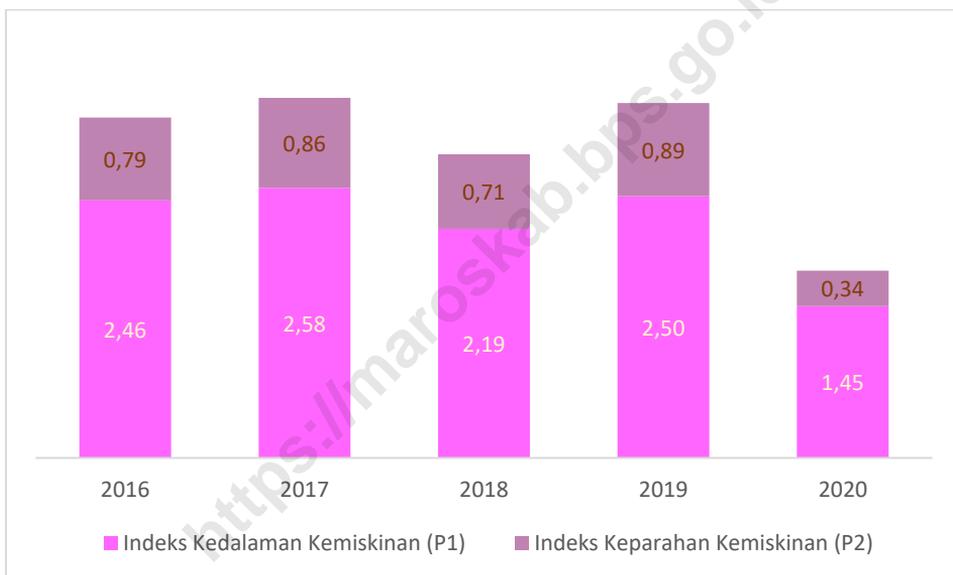
Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

Berdasarkan Gambar 7.3, P1 Kabupaten Maros sebesar 2,46 pada tahun 2016. Kemudian, P1 meningkat menjadi sebesar 2,58 pada tahun 2017. P1 mengalami penurunan menjadi 2,19 pada tahun 2018. Selanjutnya, P1 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,50 pada tahun 2019. P1 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1,45 pada tahun 2020. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

Sementara itu, untuk melihat masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin digunakan ukuran *Poverty Severity Index* (P2). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari *poverty gap* tertimbang yang penimbangannya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Dengan mengkuadratkan *poverty gap*, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang makin jauh di bawah garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Maros sebesar 0,79 pada tahun 2016. Kemudian, P2 meningkat menjadi sebesar 0,86 pada tahun 2017. P2 mengalami penurunan menjadi 0,71 pada tahun 2018. Selanjutnya, P2 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,89 pada tahun 2019. P2 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,34 pada tahun 2020.

Gambar 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Maros Tahun 2016–2020



Sumber : Kabupaten Maros Dalam Angka 2021

<https://maroskab.bps.go.id>



SOSIAL LAINNYA

Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas yang  
**Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel**

di Kabupaten Maros Tahun 2020 **86,16** persen ←

Persentase Anggota Rumah Tangga  
Berusia 5 Tahun ke Atas yang

**Mengakses Internet (Termasuk  
Facebook, Twitter, BBM,  
Whatsapp)**

di Kabupaten Maros Tahun 2020

**54,55** persen



Persentase Penduduk yang  
Menjadi

**Korban Kejahatan**

di Kabupaten Maros  
Tahun 2020

**0,64** persen

## BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Aspek sosial, seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

Rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas dan bekerja. Tingkat keamanan wilayah dapat menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan sosial wilayah tersebut. Semakin rendah tingkat kejahatan di suatu wilayah menjadi indikasi semakin nyamannya wilayah tersebut, yang pada ujungnya berafiliasi pada peningkatan kesejahteraan sosial pada wilayah tersebut.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis. Semakin besar masyarakat mendapatkan pelayanan kredit usaha semakin mempermudah masyarakat untuk meningkatkan aktivitas usahanya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan kesehatan gratis menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pelayanan kesehatan gratis tersebut masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya.

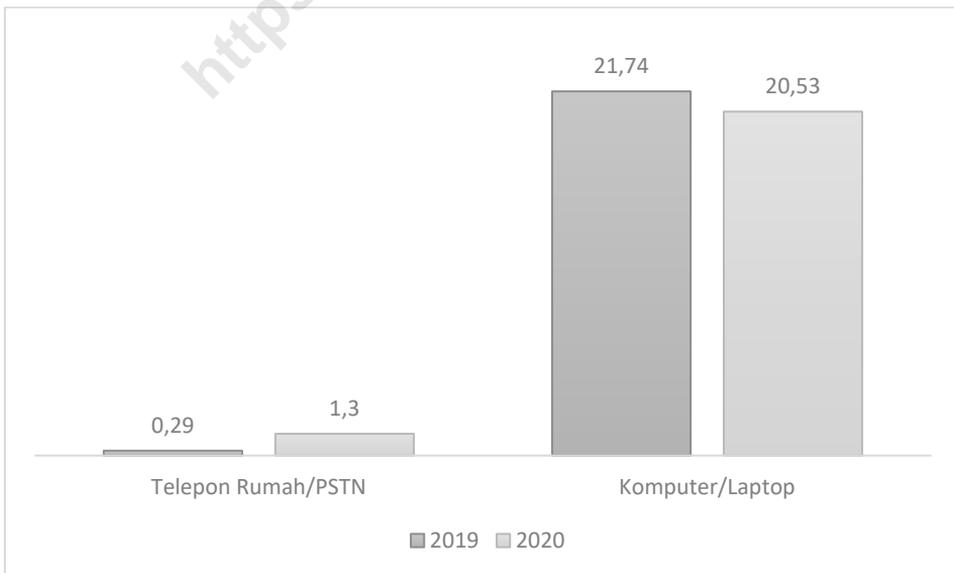
### 8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ketersediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Kebutuhan akan

penggunaan media sosial untuk memperoleh informasi maupun tetap berhubungan dengan “dunia luar” telah menjadi begitu penting bagi masyarakat. Peralatan untuk menunjang hal tersebut antara lain bisa menggunakan telepon (baik seluler maupun tetap), atau komputer (personal computer, laptop, dan tablet), serta ketersediaan akses internet.

Perkembangan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Pesatnya perkembangan teknologi telepon seluler membuat telepon rumah semakin ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan telepon rumah. Berdasarkan Gambar 8.1 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah/PSTN sebesar 0,29 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 1,3 persen pada tahun 2020. Penggunaan telepon rumah yang mengharuskan seseorang berada di posisi tertentu yang terpasang jaringan telepon semakin ditinggalkan masyarakat karena dianggap kurang efisien dalam mendukung mobilitas penggunanya. Sedangkan, penggunaan komputer/laptop sebesar 21,74 persen pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 20,53 persen pada tahun 2020.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah/PSTN dan Komputer/Laptop di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Tabel 8.1 terlihat bahwa penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Maros cukup tinggi. Pada tahun 2020, terdapat 86,16 persen anggota rumah tangga berusia 5 tahun keatas yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel atau komputer (PC/desktop, laptop/ notebook, tablet) selama tiga bulan terakhir. Hal ini antara lain karena penggunaan alat teknologi dan komunikasi sudah sangat dekat dengan masyarakat, terutama sebagai media untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sejalan dengan persentase penggunaannya yang tiinggi, persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun keatas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel juga tinggi, yaitu sebanyak 63,60 persen pada tahun 2020.

Tabel 8.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi selama Tiga Bulan Terakhir di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)

Indikator TIK	Persentase		Total
	Ya	Tidak	
Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	86,00	14,00	100,00
Menguasai/Memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	63,60	36,40	100,00
Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)	54,55	45,45	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan 2020

Internet sebagai salah satu jendela ilmu pengetahuan, merupakan teknologi yang berkembang sangat pesat. Berbagai sektor ekonomi pun telah banyak memanfaatkan teknologi tersebut. Penggunaan internet pun semakin memasyarakat. Persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun keatas yang mengakses internet (termasuk facebook, twitter, BBM, Whatsapp) sebesar 54,55 persen pada tahun 2020.

## 8.2 Tingkat Keamanan

Selain teknologi dan informasi, aspek keamanan di suatu wilayah turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tingginya persentase korban tindak kejahatan mengindikasikan masih kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga mendorong pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Penduduk yang termasuk dalam korban kejahatan yang dicakup adalah pencurian, pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, atau lainnya kecuali kejahatan kasus pembunuhan karena yang bersangkutan sudah tidak menjadi anggota rumah tangga lagi.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Menjadi Korban Kejahatan Selama Satu Tahun Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Maros Tahun 2020 (persen)

Jenis Kelamin	2019	2020
Laki-Laki	0,93	0,84
Perempuan	1,36	0,44
Laki-Laki + Perempuan	1,15	0,64

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

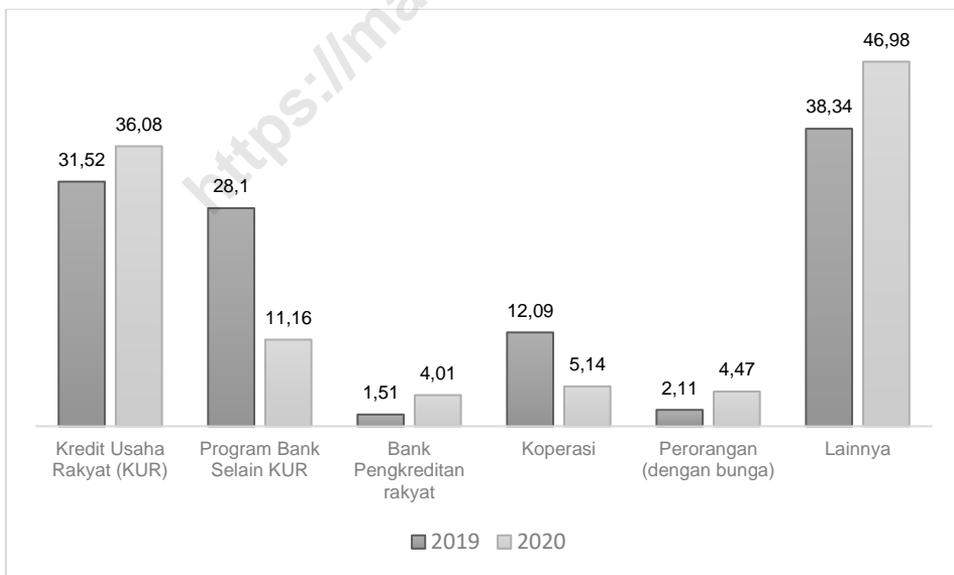
Berdasarkan Tabel 8.2, sebanyak 1,15 persen penduduk Kabupaten Maros mengaku pernah menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir pada tahun 2019. Artinya setiap 100 penduduk Kabupaten Maros, setidaknya ada 1 orang yang menjadi korban kejahatan pada tahun 2019. Angka tersebut menurun menjadi sebesar 0,64 persen pada tahun 2020. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki yang pernah menjadi korban kejahatan lebih banyak dibandingkan perempuan, meskipun secara fisik perempuan dianggap paling rentan menjadi korban kejahatan. Penduduk laki-laki yang pernah menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir sebesar 0,93 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi sebesar 0,84 persen pada tahun 2020. Sedangkan, penduduk perempuan yang pernah menjadi korban kejahatan selama satu tahun terakhir sebesar 1,36 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi sebesar 0,44 persen pada tahun 2020.

## 8.3 Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis

Selain tingkat keamanan wilayah, bantuan kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis juga dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Aliran dana ke masyarakat berupa kredit usaha yang berdampak kepada pergerakan ekonomi rakyat akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun bentuk pelayanan pemberian kredit usaha kepada masyarakat dapat berasal dari pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya maupun perorangan.

Pemberdayaan dalam bentuk pemberian kredit usaha ini akan mendukung peningkatan pendapatan, produktivitas, dan penyediaan lapangan kerja. Beberapa contoh program pemberian kredit usaha dari pemerintah diantaranya KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang diberikan oleh beberapa bank terpilih dan maupun program lain selain KUR. Selain bank, koperasi juga memberikan layanan kredit usaha kepada masyarakat.

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)



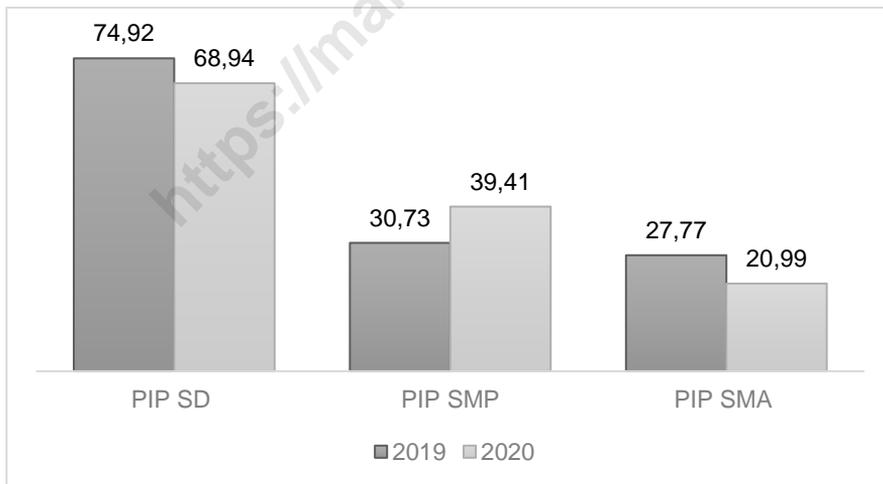
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Gambar 8.2, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha dari lainnya adalah terbesar sebesar 38,34 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 46,98 persen pada tahun 2020. Jenis kredit

usaha lainnya termasuk kredit pegadaian, perusahaan leasing, KUBE, BUMDES, dan lainnya. Selanjutnya, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah terbesar kedua sebesar 31,52 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 36,08 persen pada tahun 2020. Kemudian, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha dari program bank selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah terbesar ketiga sebesar 28,1 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi sebesar 11,16 persen pada tahun 2020. Persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah terkecil sebesar 1,51 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 4,01 persen pada tahun 2020.

Pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya. Bantuan pemerintah dalam kredit usaha ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan akhirnya kesejahteraannya meningkat. Sasaran terhadap UMKM pun diharapkan bisa lebih optimal guna menstimulus perekonomian.

Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar (PIP) selama Setahun Terakhir menurut Jenis PIP di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)



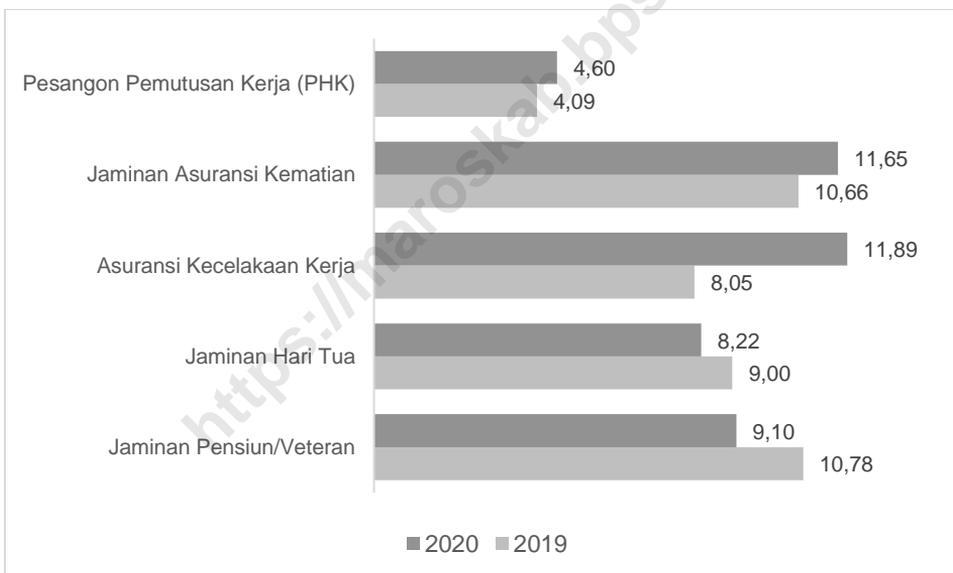
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Program Indonesia Pintar (PIP), merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada bidang pendidikan. PIP merupakan bantuan tunai pendidikan untuk anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin. Pada tahun 2019, terdapat 74,92 persen rumah tangga di Kabupaten Maros yang menerima PIP SD selama setahun terakhir dan menurun menjadi sebesar 68,94 persen pada tahun 2020. Kemudian, persentase rumah

## SOSIAL LAINNYA

tangga yang menerima PIP SMP selama setahun terakhir sebesar 30,73 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 39,41 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, persentase rumah tangga yang menerima PIP SMA selama setahun terakhir sebesar 27,77 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi 20,99 persen pada tahun 2020. Sudah selayaknya bantuan pendidikan yang sangat positif ini dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Atau Menerima Jaminan Sosial selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Jaminan Sosial di Kabupaten Maros Tahun 2019-2020 (persen)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan

Selain PIP, untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak demi tercapainya kesejahteraan sosial, perlu diperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi-kondisi sosial, diantaranya kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran dan kondisi terkait lainnya. Program pelayanan ini tentunya lebih ditujukan kepada rumah tangga yang tergolong kurang mampu. Adanya jaminan sosial merupakan wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Semakin besar jumlah penerima jaminan sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya yang kurang mampu

karena alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain. Rumah tangga yang menerima jaminan sosial didominasi oleh pensiun/veteran sebesar 10,78 persen pada tahun 2019 dan menurun menjadi sebesar 9,10 persen pada tahun 2020. Jaminan sosial pensiun/veteran merupakan program wajib pada aparatur sipil negara maupun TNI dan Polri. Selanjutnya, persentase rumah tangga yang menerima jaminan sosial asuransi kecelakaan kerja adalah terbesar pada tahun 2020 sebesar 11,89 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun 2019 (8,05 persen). Sementara itu, persentase rumah tangga yang menerima jaminan sosial Pesangon Pemutusan Kerja (PHK) adalah terkecil sebesar 4,09 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi sebesar 4,60 persen pada tahun 2020.

<https://maroskab.bps.go.id>

# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**

***— ENLIGHTEN THE NATION —***



***BADAN PUSAT STATISTIK***

***KABUPATEN MAROS***

*Jl. Jendral Sudirman, Pettuadae, Turikale*

*Kabupaten Maros, 90516*

*maroskab.bps.go.id*